



LKjIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG Tahun 2019



Alamat
Jl.Veteran No.2 Singaraja
<http://dprd.bulelengkab.go.id>





KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Buleleng Tahun 2018, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansial Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, adalah sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan melaksanakan misi, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, dan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2019 juga merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022. Laporan ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ini diharapkan bermanfaat terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 02 Januari 2020
Sekretaris DPRD KabupatenBuleleng

Ir. Putu Dana
NIP 19611111 199303 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1-10
1.2 Maksud dan Tujuan	
1.3 Gambaran Umum Sekretariat DPRD	
1.4 Isu Strategis	
1.5 Struktur Organisasi	
1.6. Sistematika Penyajian	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	2
2.1. RPJMD DAN RENSTRA Sekretariat DPRD 2017-2022	11-18
2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi	
2.1.2 Tujuan	
2.1.3 Sasaran	
2.1.4 Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan	
2.1.5 Tema, Prioritas, dan Sasaran Pembangunan	
2.2. Indikator Kinerja dan IKU.	
2.3. Perjanjian Kinerja.	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	3
3.1 Kerangka Pengukuran	19-37
3.2 Capaian Kinerja	
3.2.1 Capaian Kinerja Makro	
3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran	
3.3 Evaluasi Kinerja	
3.3 Akuntabilitas Keuangan.	
3.4 Prestasi yang Dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2019.	
BAB IV PENUTUP	4
LAMPIRAN	38-39



BAB I **PENDAHULUAN**

Bab I **Memuat**

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Maksud dan Tujuan**
- 1.3 Gambaran Umum Organisasi**
- 1.4 Isu Strategis**
- 1.5 Struktur Organisasi**
- 1.6 Sistematika Penyajian**

1.1 Latar Belakang

Mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sedangkan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Pemerintahan yang baik merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan barang-barang dan jasa-jasa publik (*public goods and services*). Pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesionalitas serta etos kerja dan moral yang tinggi.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam persepektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Kewajiban membuat LKjIP dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Sebaliknya, LKjIP yang baik haruslah didahului dengan tercapainya secara baik sasaran kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat LKjIP yang baik kalau kinerja instansi pemerintah tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2018 ini disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022 dan RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memerhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2019 yang merupakan kinerja tahun pertama pelaksanaan RPJMD tahun 2017-2022 dan RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. LKjIP Tahun 2019 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD dan RENSTRA, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasannya yang memadai atas kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja.

1.2 Maksud dan Tujuan

LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun



dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKjIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Kondisi Demografis

a. Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat. Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng berada Sekretaris Daerah, dimana sekretariat DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng membawahi empat bagian yaitu Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Hukum dan Persidangan serta Bagian Pengawasan dan Humas, serta di dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh 55 orang staf PNS, 1 orang staf tenaga honorer, serta 120 tenaga kontrak. Adapun rincian jumlah dan komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dapat diuraikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah dan Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng
Tahun 2019

No.	Klasifikasi Pegawai	Jumlah (Orang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pegawai Negeri Sipil	55	PNS
2	Pegawai Honorer	1	Honorer
3	Pegawai Kontrak Daerah	120	Tenaga Kontrak
Jumlah		176	Pegawai

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2019.



LKJIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG *Tahun 2019*

Klasifikasi Golongan Pegawai Negeri Sekretariat DPRD Kab. Buleleng Th. 2019

No.	Klasifikasi Pegawai	Jumlah (Orang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Golongan I	1	-
2	Golongan II	26	-
3	Golongan III	23	-
4	Golongan IV	5	-
Jumlah		55	

Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Th. 2019

No.	Pendidikan Pegawai	Jumlah (Orang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	S2	4	-
2	S1	19	-
3	D.III	2	-
4	SMA	29	-
5	SMP	1	-
6	SD	-	-
Jumlah		56	

NO	JABATAN	ESELON					JUMLAH	KET
		I	II	III	IV	V		
1.	Struktural	-	1	4	12	-	17	-
2.	Fungsional Umum	-	-	-	38	-	-	-
3.	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	-	-



Gambaran Umum DPRD Kabupaten Buleleng

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah (legislatif) yang dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa DPRD mempunyai kedudukan sebagai mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah dan memelihara hubungan antar tingkat pemerintahan, dengan memangku kepentingan (stakeholder) dalam upaya menuju pembangunan yang lebih baik.

Susunan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Buleleng terdiri dari:

1. Pimpinan DPRD;
2. Komisi-komisi, yang terdiri dari 4 Komisi;
3. Badan Anggaran;
4. Badan Musyawarah;
5. Badan Pembentukan Perda;
6. Badan Kehormatan serta
7. Fraksi yang terdiri dari 6 Fraksi.

KOMPOSISI JUMLAH ANGGOTA DPRD KABUPATEN BULELENG BERDASARKAN PARTAI POLITIK DAN GENDER PERIODE 2014-2019

NO	PARTAI POLITIK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PDI PERJUANGAN	13 ORANG	2 ORANG	15 ORANG
2	GOLONGAN KARYA	7 ORANG	-	7 ORANG
3	DEMOKRAT	5 ORANG	1 ORANG	6 ORANG
4	HANURA	6 ORANG	-	6 ORANG
5	GERINDRA	5 ORANG	1 ORANG	6 ORANG
6	NASDEM	2 ORANG	2 ORANG	4 ORANG
7	PPP	1 ORANG	-	1 ORANG
	JUMLAH	39 ORANG	6 ORANG	45 ORANG



1.4 Isu Strategis

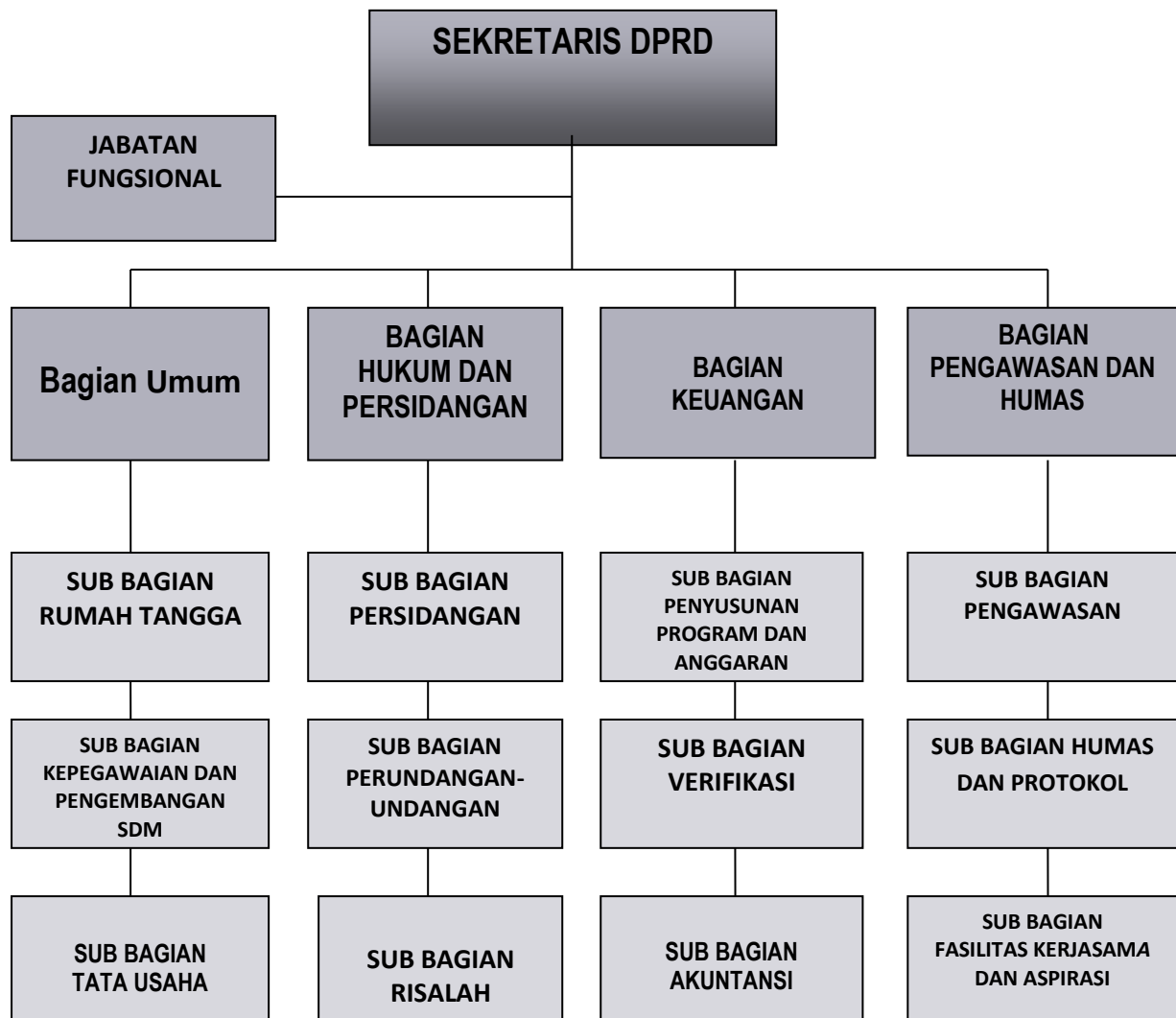
Secara umum isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RPJMD 2017-2022 dan RENSTRA Sekretariat DPRD kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut.

- a) Dalam upaya memberikan pelayanan yang prima masih dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya aparatur dan masih terbatasnya sarana dan prasarana;
- b) Dengan tidak optimalnya pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD mengakibatkan lambatnya peningkatan kinerja dewan;
- c) Kepentingan golongan dan kepentingan teknis yang bercampur aduk dan sulit dibedakan, berpengaruh terhadap capaian kinerja;
- d) Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah yang sering terjadi perlu kepada semua pihak sehingga tidak menghambat kelancaran dan tertib administrasi disosialisasikan;
- e) Terbatasnya anggaran masih dirasakan menghambat pelaksanaan tupoksi



1.5 Struktur Organisasi.

Struktur Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng disajikan pada Gambar 1.1;





Rincian dari Susunan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng sesuai dengan gambar 1.1 adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD

Empat bagian terdiri dari:

a. Bagian Umum :

- Subbagian Rumah Tangga;
- Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
- Subbagian Tata Usaha;

b. Bagian Keuangan meliputi :

- Subbagian Akuntansi;
- Subbagian Ferivikasi;
- Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;

c. Bagian Hukum dan Persidangan :

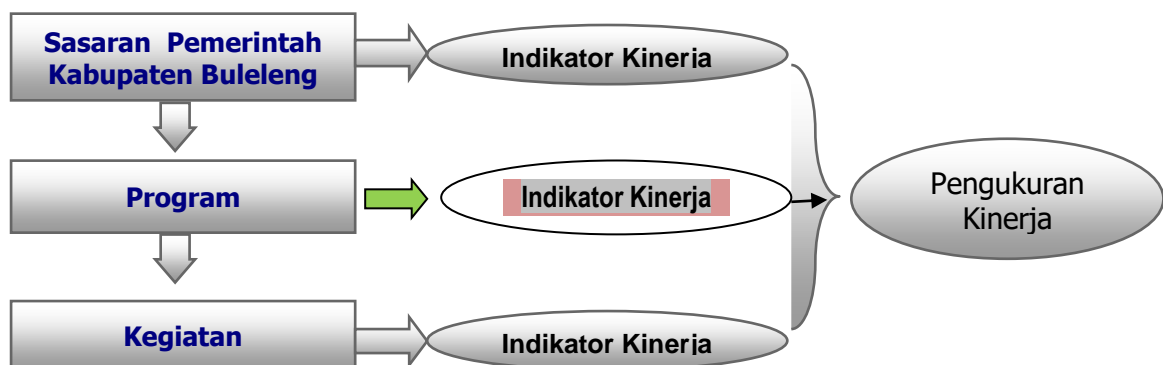
- Subbagian Persidangan;
- Subbagian Risalah;
- Subbagian Perundang undangan;

d. Bagian Pengawasan dan Humas:

- Subbagian Pengawasan;
- Subbagian Humas dan Protokol
- Subbagian Fasilitas kerjasama dan Aspirasi .

1.6 Sistematika Penyajian

LKjIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi yang berkaitan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Alur pikir pengukuran kinerja pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Buleleng mengikuti alur pikir sebagaimana disajikan dalam Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Alur Fikir Pengukuran Kinerja



Sistematika LKjIP Kabupaten Buleleng tahun 2019 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018.

Pada bab II pada intinya diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2018.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

Pada bab III diuraikan (1) Capaian Kinerja Sekretariat DPRD, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Sekretariat untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Sekretariat DPRD. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Jika ada)
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya



- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP.

Pada bab IV diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan, untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab II Memuat

- 2.1 RPJMD dan RENSTRA Sekretariat DPRD
- 2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi
- 2.1.2 Tujuan
- 2.1.3 Sasaran
- 2.1.4 Strategi, dan arah Kebijakan Dalam RENSTRA 2017-2022
- 2.1.5 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
- 2.2 Indikator Kinerja Makro dan Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Perjanjian Kinerja, Program dan Anggaran Tahun 2019

2.1 RPJMD Kabupaten Buleleng dan RENSTRA SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Buleleng 2017-2022

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan dengan masa berlaku 5 (lima) tahun. RPJMD dan RENSTRA berisi penjabaran Visi, Misi, Program dan Kegiatan Kepala Daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), serta memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lintas SKPD dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana Kerangka Regulasi dan Pendanaannya secara indikatif.

Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan RPJMD melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Berikut disajikan beberapa komponen RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 terutama Pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi

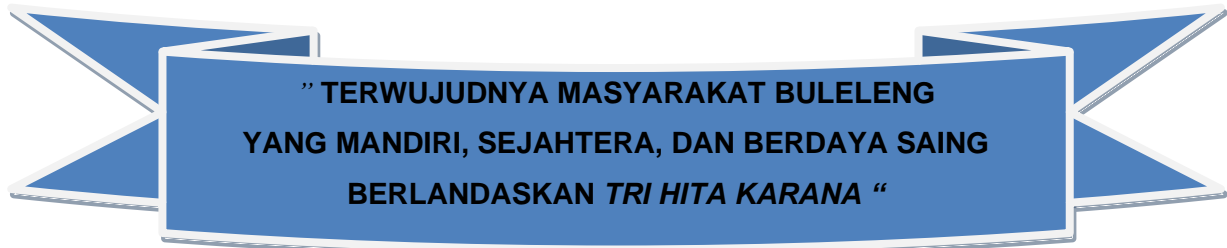
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi mempunyai jangkauan 5 tahun atau lebih kedepan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (*setting*) daerah di masa depan.

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumberdaya Alam



LKJIPSEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG Tahun 2019

(SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022 dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng sebagai berikut:



Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 ini sama dengan Visi RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
- 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;**
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

2.1.2 Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai Sekretariat DPRD, dalam 5 tahun kedepan adalah ;

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Buleleng ;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Lingkup Sekretariat DPRD .

2.1.3 Sasaran

Sasaran umum yang merupakan hasil yang diharapkan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, adalah sebagai berikut:



LKJIPSEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG Tahun 2019

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dalam rangka menunjang kelancaran tugas DPRD ;
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ;
3. Meningkatnya Kualitas Sistem pelaporan capaian kinerja dan Penyusunan Program Anggaran Sekretariat DPRD ;
4. Meningkatnya kualitas fasilitasi rapat-rapat pembahasan Produk Hukum DPRD ;
5. Meningkatnya Layanan Publikasi dan Keprotokolan kegiatan DPRD serta fasilitasi kerjasama dan Aspirasi Masyarakat.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dipaparkan di atas memiliki keterkaitan, artinya visi memiliki misi, setiap misi memiliki tujuan dan sasaran. Sekretariat mendukung Misi ke 3 dari 6 Misi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Keterkaitan itu dinyatakan dalam bentuk matrik pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi: Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan TriHita Karana

Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Buleleng ;2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Lingkup Sekretariat DPRD .	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dalam rangka menunjang kelancaran tugas DPRD ;2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ;3. Meningkatnya Kualitas Sistem pelaporan capaian kinerja dan Penyusunan Program Anggaran Sekretariat DPRD ;4. Meningkatnya kualitas fasilitasi rapat-rapat pembahasan produk hukum DPRD ;5. Meningkatnya Layanan Publikasi dan Keprotokolan kegiatan DPRD serta fasilitasi kerjasama dan Aspirasi Masyarakat.

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Dalam RENSTRA 2017-2022

Strategi dan arah kebijakan daerah terkait dengan tujuan dan sasaran. Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan daerah disajikan pada tabel 2.2



LKJIPSEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG Tahun 2019

Tabel 2.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022

- Visi : Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana.
- Misi : Menumbuh kembangkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan pembangunan.

Strategi	Arah Kebijakan
3	4
<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan Penataan Administrasi2. Penilaian disiplin Aparatur3. Penilaian Kinerja Aparatur4. Melaksanakan Perencanaan Anggaran5. Melaksanakan Penataan Administrasi dan pengelolaan Administrasi Keuangan6. Mengoptimalkan fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD7. Mengoptimalkan layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolanterhadap tugas dan fungsi DPRD8. Meningkatkan kemampuan aparatur melalui program peningkatan kapasitas aparatur sesuai kompetensinya.	<ol style="list-style-type: none">1. Memfasilitasi seluruh unsur pimpinan dan anggota Dprd untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman luas yang dibutuhkan atas materi-materi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD;2. Menyediakan seragam dinas beserta perlengkapannya bagi seluruh aparatur;3. Menyediakan barang dan jasa keperluan kantor sesuai kebutuhan;4. Mengadakan sarana dan prasarana pelayanan prioritas;5. Mengikut sertakan dan atau mendorong aparatur berpartisipasi pada kegiatan - kegiatan yang sifatnya dapat meningkatkan kapasitasnya dalam melayani tugas dan fungsi DPRD

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 telah menyediakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah tahun 2017-2022. Indikator kinerja tahun 2019 yang memuat indikator kinerja, satuan ukur, dan target tahun 2019 disajikan pada Tabel 2.3.



LKJIPSEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG Tahun 2019

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target 2018
1	Persentase peningkatan administrasi perkantoran	100%
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%
3	Persentase Sumberdaya aparatur yang disiplin aparturnya baik	100%
4	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%
5	Persentase system pelaporan capaian kinerja keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%
6	Persentase Perencanaan Anggaran yang selesai disusun tepat waktu	100%
7	Persentase Pembahasan Rancangan peraturan daerah yang ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah	100%
8	Persentase layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan yang baik	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan criteria indikator kinerja yang baik. Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, untuk tahun 2017 telah menyusun IKU yang memuat Kinerja Utama Organisasi.

Adapun IKU Sekretariat DPRD ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan Kinerja Sekretariat DPRD. Dalam Hal ini Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD serta cara pengukurannya, disajikan pada Tabel 2.4.



LKJIPSEKRETARIAT DPRD KABUPATENBULELENG Tahun 2019

Tabel 2.4.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 Sekretariat DPRD

N o	SasaranStrategis	IndikatorKinerja		Satua n	Target Tahun n	Triwulan	Target	Realisa si	Capaian (%)	Keteran gan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya fasilitasi rapat-rapat pembahasan produk hukum DPRD yang ditindak lanjuti menjadi Perda	1.1	Persentase Pembahasan Rancangan peraturan daerah yang ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah	%	100	Triwulan 1	25	13.92	55.68	-
						Triwulan 2	50	44.77	89.54	-
						Triwulan 3	75	61.08	60.68	-
						Triwulan 4	100	94.07	94.07	-
						Kondisi Akhir (F)		94.07	94	-
2	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.1	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	Triwulan 1	25	26.94	82.64	-
						Triwulan 2	50	63.4	88.74	-
						Triwulan 3	75	88.75	76.01	-
						Triwulan 4	100	99.05	98.95	-
						Kondisi Akhir (F)		98.95	99	-

Keterangan

Warna	Prosentase	
	n/a	Tidak Ada Target
	< 90%	Tidak Tercapai
	=90%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

2.3 Perjanjian Kinerja



LKJIPSEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Perjanjian kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tahun 2019 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tahun 2019 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2017-2022, dokumen RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019. Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019, disajikan pada Tabel 2.5, beserta program dan anggaran pada tabel 2.6

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2019

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target/Satuan	
1	2	3		4	
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Buleleng	1	Persentase peningkatan layanan Administrasi, sarana dan prasarana yang baik dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	%	100
		2	Persentase peningkatan Sistem Laporan Capaian Kinerja keuangan dan Penyusunan, Perencanaan Anggaran Sekretariat DPRD yang tepat waktu	%	100
		3	Persentase Pembahasan Ranperda yang ditindaklanjuti menjadi Perda	%	90
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng	4	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur yang disiplin aparturnya baik		
		5	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi	%	90

Tabel 2.6
Program dan Anggaran untuk Merealisasikan Perjanjian Kinerja



LKJIPSEKRETARIAT DPRD KABUPATENBULELENG

Tahun 2019

No	Program	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Keterangan
1	2	3	
1.	Program PelayananAdministrasi Perkantoran	17,573,197,200.00	APBD
2.	Program PeningkatanSarana dan Prasarana	2,299,209,100.00	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	483,500,000.00	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2,629,991,500.00	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	269,300,000.00	APBD
6	Program Perencanaan Anggaran SKPD	259,534,000.00	APBD
7	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	18,777,094,700.00	APBD
8	Program Peningkatan Layanan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan Kemasyarakatan dan Keprotokolan	1,079,360,000.00	APBD
J U M L A H		43,371,186,500.00	APBD

Singaraja, 02 Januari 2019
Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng,

Ir. Putu Dana

NIP 19611111 199303 1 005



BAB III **AKUNTABILITAS** **KINERJA**

Bab III **Memuat**

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

3.2 Capaian Kinerja

3.2.1 Capaian Kinerja Utama

3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran

3.3 Evaluasi Kinerja Sasaran **Strategis**

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis\ Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ini substansinya memuat: (1) Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: (a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; (b) Membandingkan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; (c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; (d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); (e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; (f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (2) Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara



LKjIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG Tahun 2019

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Capaian kinerja dihitung dengan formulasi tertentu sebagai berikut.

- 1) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang **semakin baik**, dihitung dengan formula:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang **semakin buruk**, dihitung dengan formula:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Formulasi (2) digunakan untuk menghitung capaian kinerja indikator kinerja angka pengangguran, angka kematian dan sejenisnya.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, untuk mendapatkan predikat tertentu tahun ini dibutuhkan angka capaian lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut.

91 s/d 100	:	Sangat Berhasil
76 s/d 90	:	Berhasil
61 s/d 75	:	Cukup Berhasil
46 s/d 60	:	Kurang
0 s/d 45	:	Sangat Kurang



LKJIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG Tahun 2019

Predikat nilai capaian kinerja tahun ini dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Angka Capaian	Predikat	Warna
1	2	3
91-100	Sangat Berhasil	
76- 90	Berhasil	
61- 75	Cukup Berhasil	
46- 60	Kurang	
0-45	Sangat Kurang	

Dari perbandingan pemberian predikat atas capaian kinerja tahun lalu dan tahun ini menunjukkan, untuk mendapat predikat Sangat Berhasil tahun lalu dibutuhkan angka capaian 85-100. Sedangkan tahun ini untuk mendapatkan predikat Sangat Berhasil dibutuhkan angka capaian 91-100. Demikian juga untuk mendapatkan predikat Berhasil tahun lalu dibutuhkan angka capaian 70-<85. Sedangkan untuk mendapatkan predikat Berhasil tahun ini dibutuhkan angka capaian 76-90. Meningkatkan standar untuk mencapai predikat ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi yang disajikan dalam capaian kinerja organisasi yang menggunakan ukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang indikator kerjanya menggunakan Indikator Kinerja Utama.

3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tahun 2019 menunjukan hasil disajikan pada Tabel 3.2



LKJIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG *Tahun 2019*

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2018	Capaian S/d 2018 Terhadap Target 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Persentase fasilitasi Pembahasan Ranperda yang ditindak lanjuti menjadi Perda	%	105.25	86.56	99.98	94.07	90	(5.91)
2. Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	97.09	98.05	98.95	98.95	90	0

3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran dengan Indikator Sesuai Perjanjian Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran beserta capaian indikator kinerja disajikan pada lampiran 2. Sedangkan rata-rata capaian kinerja sasaran beserta predikat yang diperoleh, disajikan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	0-45	46-60	61-75	76-90	91-100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pelayanan administrasi, Sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya pelayanan administrasi, Sarana dan	2	81.75				Berhasi	



LKJIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG *Tahun 2019*

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	0-45	46-60	61-75	76-90	91-100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	prasarana aparatur							
2	Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	2	99.37					<i>Sangat berhasil</i>
3	Meningkatnya perencanaan, sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.	2	99.30					<i>Sangat Berhasil</i>
4	Meningkatnya produk hukum DPRD yang dihasilkan	1	94.07					<i>Sangat Berhasil</i>
5	Meningkatnya layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, kemasyaarakatan dan keprotokolan	1	98.28					<i>Sangat Berhasil</i>

Untuk mengetahui secara cepat jumlah sasaran maupun indikator untuk masing-masing Predikat maka tabel 3.3 di atas dapat diresum menjadi tabel 3.4

Tabel 3.4

Resume Predikat Capaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Persentase
1	2	3	4
1	Sangat Berhasil	5	94.14
2	Berhasil		
3	Cukup Berhasil		
4	Kurang		
5	Sangat Kurang		
	Jumlah	5	94.14



LKJIP SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BULELENG Tahun 2019

3.3 Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

1. Sasaran 1.

Meningkatnya pelayanan administrasi, Sarana dan prasarana aparatur

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 1, Meningkatnya pelayanan administrasi, Sarana dan prasarana aparatur, **dalam kategori Cukup Berhasil**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi, Sarana dan prasarana aparatur pada Tabel 3.3 sebagai berikut ;

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 1 Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022
Tahun 2019

Indikator Kinerja	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Capaian Th. 2018
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Thd 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang diselesaikan	94.39	96.34	89.90	95.43	100	88.19	92.15	93.79
2 Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	94.90	98.32	92.19	97.35	100	67.56	67.19	82.27
Rata-Rata Capaian	94.64	97.33	91.04	96.39	100	77.87	79.67	88.03



Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 1, Meningkatnya pelayanan administrasi, Sarana dan prasarana aparatur yang memiliki dua indikator, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Realisasi sasaran 1 tahun 2019 untuk 2 indikatornya belum sesuai target tahun 2019 namun termasuk kategori Berhasil, karena realisasi fisiknya hampir rata-rata berhasil.
2. Realisasi sasaran 1 tahun 2019 belum satupun indikatornya melampaui realisasi tahun 2018 dan satu indikatornya yang lain kurang dari realisasi 2018, bila di rata-ratakan antara realisasi sasaran 1 tahun 2019 belum bisa melampaui tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan ada 3 kegiatan yang tidak terealisasi.
3. Realisasi kinerja kegiatan tahun 2019 juga belum sesuai target akhir RPJMD tahun 2019.

Capaian Sasaran 1, Meningkatnya pelayanan administrasi, Sarana dan prasarana aparatur, dicapai melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Pelayanan administrasi perkantoran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dengan jumlah anggaran **Rp. 19,872,406,300.00** dan realisasi anggaran **Rp. 19,437,586,076.45 (97.81%)**.

Capaian Sasaran 1 tahun 2019 yang belum sesuai dengan target, dengan realisasi fisik yang mencapai rata-rata 84.07% dan realisasi anggaran 81.75% menunjukkan adanya efisiensi.

Meskipun capaian kinerja Sasaran 1 belum termasuk **Sangat Berhasil**, karena terkendala bermacam faktor teknis yang sudah klasik, sebagai berikut .

1. Masih rendahnya pengetahuan cara perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang baik dan benar, untuk mengoptimalkan administrasi perkantoran.
2. Berubah-ubahnya porsi tuntutan dan kebutuhan akan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan fasilitasi, terhadap pemenuhan hak dan fungsi DPRD..
3. Pengetahuan tentang tugas dan fungsi organisasi masih belum memadai, Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan administrasi ke arsip dan inventarisasi barang organisasi yang bersangkutan.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan dan perlu dilanjutkan ke depan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut.



LKJIP SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN BULELENG Tahun 2019

1. Secara intens melakukan sosialisasi dan evaluasi terhadap pengoperasian sarana dan prasarana yang ada di Lingkup Sekretariat DPRD, agar bisa digunakan tepat sasaran.
2. Mengoptimalkan dan mempertajam lagi analisis kebutuhan dalam rangka mendukung fasilitasi terhadap hak dan fungsi DPRD di tahun berikutnya.
3. Melaksanakan Koordinasi antar bagian dan subbagian, untuk menghindari saling lempar tanggung jawab terhadap barang inventaris organisasi.

Sasaran 2

Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 2, Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur dengan dua indikator kinerja diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja **99.37%** termasuk katagori **Sangat Berhasil**. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 2 Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur disajikan pada tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran 2 Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022
Tahun 2019

Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Tahun 2019			Capaian Th.2018 Thd 2019
					Target	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Persentase Sumber daya yang disiplin aparturnya baik	99.69	99.70	99.78	99.78	100	99.06	99.69	99.73
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	87.09	88.89	98.05	96.95	100	97.14	99.05	98.00
Rata-rata capaian	93.39	94.30	95.7	98.36	100	98.10	99.37	98.87

Dari pengukuran kinerja Sasaran 2 di atas ditarik simpulan sebagai berikut.



LKJIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG Tahun 2019

1. Realisasi tahun 2019 dari dua indikator kinerja, telah mencapai target yang ditetapkan masing-masing mencapai 100%.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, realisasi tahun 2019 dua indikator kinerja melampaui realisasi tahun 2018.
3. Dua Indikator Sasaran 2 Tahun 2018 Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur, telah memenuhi target RPJMD 2017-2022.

Capaian Sasaran 2 dicapai melalui Program peningkatan disiplin aparatur dan Program peningkatan kapasitas SDA, dengan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng **Rp. 3,113,491,500.00 dan realisasi anggaran Rp. 3,021,277,335.00 (97.04%)**.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka mencapai sasaran kinerja sebagai berikut.

1. Masih ada beberapa aparatur yang disiplinnya masih kurang.
2. Belum maksimalnya kompetensi yang dimiliki aparatur dalam tupoksinya masing-masing.

Usaha-usaha yang telah dilakukan dan perlu diupayakan untuk mengatasi kendala adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan pengawasan dan penilaian terhadap individu disiplin aparatur.
2. Melibatkan Aparatur dalam kegiatan-kegiatan pelatihan formal maupun bimbingan teknis yang sesuai dengan tupoksinya.
3. Melibatkan Aparatur dalam kegiatan pendampingan konsultasi dan koordinasi Dewan, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya dalam melaksanakan tugas.

Sasaran 3

Meningkatnya perencanaan, sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 3, Meningkatnya perencanaan, sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan dua indikator diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sasaran **99.31 %** termasuk katagori **Sangat Berhasil**. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 3 Meningkatnya perencanaan, sistem pelaporan capaian kinerja keuangan dan jaminan kesehatan, disajikan pada Tabel 3.5 berikut.



LKjIP SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BULELENG Tahun 2019

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran 3 Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017
Tahun 2019

Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Tahun 2019			Capaian 2018 Thd 2019
					Target	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Persentase perencanaan anggaran yang baik	99.74	99.39	99.16	97.85	100	97.77	99.26	98.21
2 Persentase sistem pelaporan capaian kinerja keuangan yang ditindak lanjuti	91.21	99.93	99.87	99.70	100	98.04	99.35	99.53
Rata-rata capaian	95.48	99.66	99.52	99.51	100	97.91	99.31	98.87

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 3 di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2019 untuk semua indikator, dua indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, realisasi tahun 2019 dua indikator masih belum bisa melampaui realisasi tahun 2018 dan realisasinya masih kurang dari realisasi tahun 2018.
3. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2018, realisasi tahun 2019, dua indikator kinerja telah mencapai target tahun 2018.



Capaian Sasaran 3, Meningkatnya perencanaan, sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dicapai melalui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dan Program Perencanaan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng **Rp. 528,834,000.00 dan realisasinya Rp.517,779,585.00 (97.91%)**. Realisasi anggaran Sasaran 3 kurang dari 100% namun Realisasi fisik dan Capaian Sasarannya sudah mencapai target, artinya menunjukkan Capaian sasaran 3 sudah mencapai target dengan adanya efisiensi.

Sasaran 4

Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Yang Ditindak Lanjuti Menjadi Peraturan Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 4 Meningkatnya Fasilitas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Yang Ditindak Lanjuti Menjadi Peraturan Daerah, melalui Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah diperoleh rata-rata total capaian kinerja sasaran sebesar 99.55% dan satu **Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD yaitu Persentase pembahasan rancangan peraturan daerah 94,07%**, ini menunjukkan capaian termasuk kategori **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 4, Meningkatnya kualitas Fasilitas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang ditindak lanjuti menjadi Peraturan Daerah, disajikan pada Tabel 3.6 berikut;

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran 4 Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017
Tahun 2019



LKjIP SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN BULELENG Tahun 2019

Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Tahun 2019			Capaian 2018 Thd 2019
					Target	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Persentase fasilitasi pembahasan ranperda yang ditindak lanjuti menjadi perda	84.32	98.00	94.92	98.66	90	91.03	94.07	96.37
Rata-rata capaian	84.32	98.00	94.92	98.66	90	91.03	94.07	96.37

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 4, Meningkatnya Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang ditindak lanjuti menjadi peraturan daerah di atas dapat ditarik simpulan berikut;

1. Capaian tahun 2019 sudah mencapai 94.07% dari target 90%, tergolong Sangat Berhasil.
2. Dibandingkan realisasi tahun 2018, realisasi tahun 2019 belum bisa melampaui realisasi anggaran tahun 2018.
3. Realsasi fisik tahun 2019 bila di akumulasikan dalam total kinerja fisiknya sudah mencapai target 99.16% dari 90% yang ditargetkan, berarti menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran.

Capaian Sasaran 4 di atas dicapai melalui pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan anggaran **Rp.18,777,094,700.00** dan realisasi anggaran **Rp.18,500,475,604.00 (98.52 %)**.

SASARAN 5

Meningkatnya layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan.



LKIP SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN BULELENG Tahun 2019

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 5 Meningkatnya layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan, dengan satu indikator diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sasaran **98.28%** termasuk kategori **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 5, Meningkatnya layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan disajikan dalam kolom Tabel 3.7 sebagai berikut;

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran 5 Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017
Tahun 2019

Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Tahun 2019			Capaian 2018 Thd 2019
					Target	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Persentase peningkatan layanan pemberitaan pembangunan, pemerintahan kemasyarakatan dan keprotokolan.	79.63	92.09	91.15	95.65	100	95.19	98.28	96.97
Rata-rata Capaian	79.63	92.09	91.15	95.65	100	95.19	98.28	96.97

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 5, Meningkatnya layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan, di atas dapat ditarik simpulan berikut;

1. Realisasi Tahun 2019, Indikator sasaran Meningkatnya layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan sudah mencapai target 98.28%, tergolong sangat berhasil.
2. Realisasi Indikator sasaran 5, bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, sudah ada peningkatan. Ini berarti capaian tahun 2019 melampaui capaian tahun 2018.



LKJIP SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN BULELENG Tahun 2019

3. Realisasi Tahun 2019 Indikator sasaran 5, sudah mencapai target tahun 2019 RPJMD periode 2017-2022.

Capaian Sasaran 5, Meningkatnya layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan, yang memiliki satu indikator di capai melalui Program peningkatan layanan pemberitaan pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan, dengan Anggaran setelah perubahan **Rp. 1,079,360,000.00** dan realisasi Anggaranya **Rp. 1,027,503,760.00 (95.19 %)**.

Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan sasaran 5 yang sering menjadi persoalan dalam pelaksanaanya;

1. Banyaknya kepentingan golongan antar kelompok atau golongan partai politik yang bercampur baur hingga menjadi tantangan tersendiri kedepannya dalam mewujudkan keberhasilan sasaran 5.
2. Masih rendahnya kemampuan Sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan kehumasan dan keprotokoleran dalam menunjang kegiatan tugas dan fungsi DPRD.
3. Masih rendahnya kemampuan Sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan merilis berita kegiatan dalam menunjang publikasi kegiatan DPRD, untuk tetap menjaga keharmonisan dan mewujudkan misi (ke 3) RPJMD yang menjadi misi renstra Sekretariat DPRD.

Adapun Usaha-usaha yang telah dilakukan dan perlu diupayakan untuk mengatasi kendala adalah sebagai berikut;

1. Bimbingan dan arahan teknis dari Atasan kepada para sumber daya aparatur yang berhadapan langsung dengan kegiatan keprotokolan, agar kegiatan bisa terlaksana lebih baik.
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan jurnalis dan tetap melaksanakan kegiatan jumpa pers bersama wartawan Media cetak dan Elektronik yang ada di Kabupaten Buleleng.

Dari Evaluasi Kinerja Lima sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng yang telah dicapai, dapat ditarik Simpulan sebagai berikut ;



LKjIP SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN BULELENG Tahun 2019

1. Tujuan yang diharapkan untuk Meningkatkan Kinerja Pelayanan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Buleleng dalam memfasilitasi seluruh kegiatan DPRD sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, dapat dilihat melalui Total Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, dengan total Kinerja Kegiatan **(95.23%)**.
2. Bila dibandingkan dengan total kinerja kegiatan yang di capai pada Tahun 2018 **(98.41%)**, total kinerja kegiatan yang dicapai pada Tahun 2019 **(95.23%)** menunjukkan penurunan Kinerja sebesar **3.18%**.



3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pengelolaan belanja daerah selama tahun 2019, menghasilkan efisiensi pengeluaran sebesar 1% lebih, yaitu dari anggaran Belanja Tidak Langsung setelah perubahan sebesar **Rp. 5,423,910,000.00** terealisasi sebesar **Rp. 5,369,309,826.00** dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 3.4

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Belanja Setelah Perubahan
Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	BELANJA DAERAH	48,795,096,500.00	47,873,932,186.45	98.11
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,423,910,000.00	5,369,309,826.00	98.99
3	BELANJA PEGAWAI	5,423,910,000.00	5,369,309,826.00	98.99
4	Gaji dan Tunjangan	3,291,143,950.00	3,252,743,776.00	98.83
5	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,179,687,517.00	2,158,009,211.00	99.00
6	Tunjangan Keluarga	222,124,532.00	221,313,164.00	99.63
7	Tunjangan Jabatan	163,955,000.00	156,915,000.00	95.70
8	Tunjangan Fungsional Umum	83,765,000.00	83,050,000.00	99.14



LKjIP Sekretariat DPRD KABUPATEN BULELENG *Tahun 2019*

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
9	Tunjangan Beras	144,022,560.00	143,608,860.00	99.71
10	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5,500,000.00	4,594,811.00	83.54
11	Pembulatan Gaji	43,500.00	35,961.00	82.66
12	Iuran Asuransi Kesehatan	75,000,000.00	71,379,792.00	95.17
13	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393,120,000.00	393,120,000.00	100
14	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6,925,841.00	5,179,262.00	74.78
15	Iuran Jaminan Kematian	17,000,000.00	15,537,715.00	91.39
16	Tambahan Penghasilan PNS	1,687,200,000.00	1,671,000,000.00	99.03
17	Tunjangan Hari Raya	221,992,600.00	221,992,600.00	100
18	Gaji Ketiga Belas	223,573,450.00	223,573,450.00	100

Sumber data : Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, Subagian Verifikasi, Tahun 2019

(Realisasi Belanja sebelum audit BPK)

1.4.1 Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Anggaran



Permasalahan utama pengelolaan anggaran belanja adalah terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola pemerintah daerah sebagai akibat masih relatif rendahnya proporsi PAD terhadap APBD Kabupaten Buleleng, sehingga sebagian besar sumber dana untuk membiayai pengeluaran/belanja berasal dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum dan dana perimbangan lainnya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.

Tingginya penyerapan dana untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, menyebabkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagian besar terserap untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Sehingga menyebabkan proporsi Belanja Daerah 60% untuk Belanja Tidak Langsung dan 40% untuk Belanja Langsung belum terpenuhi. Selain itu sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka untuk pemenuhan program dan kegiatan juga terbatas.

Belanja daerah dialokasikan dan dilaksanakan searah dengan prioritas program, kegiatan sesuai perencanaan strategis masing-masing satuan kerja dan mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang dalam situasi yang berubah (dinamis). Belanja daerah dialokasikan secara efisien dan efektif guna mewujudkan sasaran kinerja.

Disamping itu, juga terdapat permasalahan-permasalahan secara umum dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain :

- a. Rendahnya pencapaian realisasi pengeluaran terutama di belanja modal disebabkan adanya perubahan di dalam regulasi/peraturan dalam pengadaan belanja modal;
- b. Tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi sehubungan dengan telah bergesernya paradigma pengelolaan keuangan daerah pada SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah belum dipahami secara optimal;
- c. Kualitas sumber daya manusia/aparatur pemerintahan daerah belum memadai dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Upaya-upaya penanganan yang telah dilaksanakan antara lain :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak yang berkompeten untuk lebih mempercepat dan memperlancar proses pengadaan belanja modal;



- b. Melakukan pembinaan melalui konsultasi, fasilitasi, dan meningkatkan monitoring dan evaluasi kepada SKPD dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- c. Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis serta Kursus-kursus singkat Pengelolaan Keuangan Daerah, guna meningkatkan kualitas SDM khususnya Pengelola Keuangan Daerah pada masing-masing SKPD.

1.5 Prestasi yang Dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2019.

Sampai saat ini belum ada penghargaan atau yang diperoleh Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi fasilitasi pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.



BAB IV P E N U T U P

Bab IV
Memuat
Simpulan Umum
Langkah Perbaikan Kedepan

4.1 Simpulan Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik, atas sasaran - sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Secara lebih rinci capaian kinerja berdasarkan evaluasi atas kinerja diberi predikat **Sangat Berhasil**, **Berhasil**, **Cukup**, **Kurang**, dan **Sangat Kurang** seperti digambarkan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Simpulan Capaian Kinerja Sasaran Berdasarkan Evaluasi Kinerja

No	Predikat	JumlahSasaran	Persentase	Jumlah Indikator Kinerja	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	SangatBerhasil	5	94,14	8	93.63
2	Berhasil				
3	Cukup				
4	Kurang				
5	SangatKurang				
	Jumlah	5	94,14	8	93.63

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Tahun 2017-2022, khususnya untuk tahun anggaran 2019 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Buleleng, dan



Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng tanggal 02 Januari 2019, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui karena semata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia.

4.2 Langkah Perbaikan Kedepan

Dalam rangka mengefektifkan budaya kinerja, maka kedepan akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.
- 2) Menggunakan aplikasi e-SAKIP agar pengukuran capaian kinerja baik tingkat Kabupaten maupun tingkat SKPD lebih terkendali dan termonitor dengan baik secara berkala.
- 3) Sekretariat DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menyusun Laporan Kinerja (LKj) akan menyajikan informasi capaian kinerja yang telah diperjanjikan disertai analisis dan evaluasi yang diperlukan, selain itu akan diwajibkan pula Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dapat menyajikan informasi penyerapan anggaran yang terkait dengan pencapaian kinerjanya disertai analisis atas efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja Lembaga.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai evaluasi capaian kinerja dan bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah, akan dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumus kanakan diterapkan dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dan perbaikan layanan publik yang semakin baik di masa mendatang.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat.

Singaraja, 02 Januari 2020

Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng

Ir. Putu Dana

NIP 19611111 199303 1 005

Lampiran ;

Harap dikirim tepat waktu
beserta Laporan SPJ fungsional



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
4.00.02.02. - SEKRETARIAT DPRD
TAHUN ANGGARAN 2019

Bulan : Desember

1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		SISA ANGGARAN Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	48,795,096,500.	47,873,932,186.45	921,164,313.55	98.11	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,423,910,000.0	5,369,309,826.00	54,600,174.00	98.99	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5,423,910,000.0	5,369,309,826.00	54,600,174.00	98.99	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.0	Gaji dan Tunjangan	3,291,143,950.0	3,252,743,776.00	38,400,174.00	98.83	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,179,687,517.00	2,158,009,211.00	21,678,306.00	99.00	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.00	Tunjangan Keluarga	222,124,532.00	221,313,164.00	811,368.00	99.63	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.00	Tunjangan Jabatan	163,955,000.00	156,915,000.00	7,040,000.00	95.70	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.00	Tunjangan Fungsional Umum	83,765,000.00	83,050,000.00	715,000.00	99.14	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.00	Tunjangan Beras	144,022,560.00	143,608,860.00	413,700.00	99.71	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5,500,000.00	4,594,811.00	905,189.00	83.54	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.00	Pembulatan Gaji	43,500.00	35,961.00	7,539.00	82.66	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.00	Iuran Asuransi Kesehatan	75,000,000.00	71,379,792.00	3,620,208.00	95.17	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.00	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393,120,000.00	393,120,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6,925,841.00	5,179,262.00	1,746,579.00	74.78	

Subid_Akuntansi BKD Kab.Buleleng / Admin Pelaporan SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.00	Iuran Jaminan Kematian	17,000,000.00	15,537,715.00	1,462,285.00	91.39	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.0	Tambahan Penghasilan PNS	1,687,200,000.0	1,671,000,000.00	16,200,000.00	99.03	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.02.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1,687,200,000.00	1,671,000,000.00	16,200,000.00	99.03	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.0	Tunjangan Hari Raya	221,992,600.00	221,992,600.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.07.00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	180,639,500.00	180,639,500.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.07.00	Tunjangan Keluarga	18,306,066.00	18,306,066.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.07.00	Tunjangan Jabatan	13,545,000.00	13,545,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.07.00	Tunjangan Fungsional Umum	6,890,000.00	6,890,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.07.00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2,610,000.00	2,610,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.07.00	Pembulatan Gaji	2,034.00	2,034.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.0	Gaji Ketiga Belas	223,573,450.00	223,573,450.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.08.00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	181,923,900.00	181,923,900.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.08.00	Tunjangan Keluarga	18,501,994.00	18,501,994.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.08.00	Tunjangan Jabatan	13,545,000.00	13,545,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.08.00	Tunjangan Fungsional Umum	6,890,000.00	6,890,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.08.00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2,710,350.00	2,710,350.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.1.1.08.00	Pembulatan Gaji	2,206.00	2,206.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43,371,186,500.	42,504,622,360.45	866,564,139.55	98.00	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	925,081,800.00	894,388,200.00	30,693,600.00	96.68	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42,177,804,700.	41,352,493,375.00	825,311,325.00	98.04	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.2.3	BELANJA MODAL	268,300,000.00	257,740,785.45	10,559,214.55	96.06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	17,573,197,200.	17,198,178,417.00	375,018,783.00	97.86	
4.00.02.4.00.02.02.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	108,700,000.00	104,799,900.00	3,900,100.00	96.41	
4.00.02.4.00.02.02.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108,700,000.00	104,799,900.00	3,900,100.00	96.41	
4.00.02.4.00.02.02.01.001.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,350,000.00	1,350,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.01.001.5.2.2.01.0	Belanja perangko, materai dan benda pos	1,350,000.00	1,350,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.01.001.5.2.2.	Belanja Jasa Kantor	75,624,000.00	75,624,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.01.001.5.2.2.03.0	Belanja Jasa Tenaga kerja	75,624,000.00	75,624,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.01.001.5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	21,726,000.00	21,550,000.00	176,000.00	99.18	
4.00.02.4.00.02.02.01.001.5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,726,000.00	21,550,000.00	176,000.00	99.18	
4.00.02.4.00.02.02.01.001.5.2.2.	Belanja Operasional Kendaraan	10,000,000.00	6,275,900.00	3,724,100.00	62.75	
4.00.02.4.00.02.02.01.001.5.2.2.32.0	Belanja Bahan Bakar Minyak	10,000,000.00	6,275,900.00	3,724,100.00	62.75	
4.00.02.4.00.02.02.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	542,000,000.00	501,552,607.00	40,447,393.00	92.53	
4.00.02.4.00.02.02.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	542,000,000.00	501,552,607.00	40,447,393.00	92.53	
4.00.02.4.00.02.02.01.002.5.2.2.	Belanja Jasa Kantor	542,000,000.00	501,552,607.00	40,447,393.00	92.53	
4.00.02.4.00.02.02.01.002.5.2.2.03.0	Belanja telepon	12,000,000.00	4,665,716.00	7,334,284.00	38.88	
4.00.02.4.00.02.02.01.002.5.2.2.03.0	Belanja air	140,000,000.00	118,458,090.00	21,541,910.00	84.61	
4.00.02.4.00.02.02.01.002.5.2.2.03.0	Belanja listrik	300,000,000.00	290,634,801.00	9,365,199.00	96.87	
4.00.02.4.00.02.02.01.002.5.2.2.03.0	Belanja kawat/faksimili/internet	90,000,000.00	87,794,000.00	2,206,000.00	97.54	
4.00.02.4.00.02.02.01.003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	371,901,600.00	365,947,600.00	5,954,000.00	98.39	
4.00.02.4.00.02.02.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	371,901,600.00	365,947,600.00	5,954,000.00	98.39	

Subid_Akuntansi BKD Kab.Buleleng / Admin Pelaporan SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.01.003.5.2.2.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	221,901,600.00	221,887,600.00	14,000.00	99.99	
4.00.02.4.00.02.02.01.003.5.2.2.08.0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	221,901,600.00	221,887,600.00	14,000.00	99.99	
4.00.02.4.00.02.02.01.003.5.2.2.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	150,000,000.00	144,060,000.00	5,940,000.00	96.04	
4.00.02.4.00.02.02.01.003.5.2.2.10.0	Belanja sewa meja kursi	45,000,000.00	44,800,000.00	200,000.00	99.55	
4.00.02.4.00.02.02.01.003.5.2.2.10.0	Belanja sewa tenda	70,000,000.00	66,360,000.00	3,640,000.00	94.80	
4.00.02.4.00.02.02.01.003.5.2.2.10.0	Belanja sewa Sound Sistem	35,000,000.00	32,900,000.00	2,100,000.00	94.00	
4.00.02.4.00.02.02.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	34,000,000.00	28,316,600.00	5,683,400.00	83.28	
4.00.02.4.00.02.02.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34,000,000.00	28,316,600.00	5,683,400.00	83.28	
4.00.02.4.00.02.02.01.006.5.2.2.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34,000,000.00	28,316,600.00	5,683,400.00	83.28	
4.00.02.4.00.02.02.01.006.5.2.2.05.0	Belanja Jasa KIR	160,000.00	-	160,000.00	-	
4.00.02.4.00.02.02.01.006.5.2.2.05.0	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	33,840,000.00	28,316,600.00	5,523,400.00	83.67	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	991,222,000.00	958,825,355.00	32,396,645.00	96.73	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	402,717,800.00	389,324,200.00	13,393,600.00	96.67	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.1.	Honorarium PNS	222,650,000.00	209,800,000.00	12,850,000.00	94.22	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.1.01.0	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	36,000,000.00	36,000,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.1.01.0	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	78,200,000.00	67,200,000.00	11,000,000.00	85.93	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.1.01.0	Honorarium Bendahara, Bendahara Pembantu dan Pembantu Bendahara	51,750,000.00	50,950,000.00	800,000.00	98.45	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.1.01.0	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	10,500,000.00	10,500,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.1.01.0	Honorarium Tim Pemeriksa dan Pejabat Pemeriksaan Barang/Jasa	16,200,000.00	15,150,000.00	1,050,000.00	93.51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.1.01.0	Honorarium Petugas Penatausahaan dan Penyimpan Barang Milik Daerah	30,000,000.00	30,000,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.1.	Honorarium Non PNS	55,162,800.00	55,024,200.00	138,600.00	99.74	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.1.02.0	Honorarium/Upah Tenaga Harian	55,162,800.00	55,024,200.00	138,600.00	99.74	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.1.	Uang Lembur	124,905,000.00	124,500,000.00	405,000.00	99.67	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.1.03.0	Uang Lembur PNS	124,905,000.00	124,500,000.00	405,000.00	99.67	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	588,504,200.00	569,501,155.00	19,003,045.00	96.77	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	88,448,700.00	72,803,815.00	15,644,885.00	82.31	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	84,848,700.00	69,203,815.00	15,644,885.00	81.56	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.2.01.0	Belanja perangko, materai dan benda pos	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.2.	Belanja Jasa Kantor	108,000,000.00	107,388,000.00	612,000.00	99.43	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.2.03.0	Belanja Jasa Tenaga kerja	108,000,000.00	107,388,000.00	612,000.00	99.43	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	357,217,700.00	356,458,390.00	759,310.00	99.78	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47,510,600.00	47,175,000.00	335,600.00	99.29	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas luar daerah	309,707,100.00	309,283,390.00	423,710.00	99.86	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.2.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22,500,000.00	22,500,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.2.17.0	Belanja Kontribusi	22,500,000.00	22,500,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.2.	Belanja Operasional Kendaraan	12,337,800.00	10,350,950.00	1,986,850.00	83.89	
4.00.02.4.00.02.02.01.007.5.2.2.32.0	Belanja Bahan Bakar Minyak	12,337,800.00	10,350,950.00	1,986,850.00	83.89	
4.00.02.4.00.02.02.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	318,000,000.00	316,054,200.00	1,945,800.00	99.38	
4.00.02.4.00.02.02.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	318,000,000.00	316,054,200.00	1,945,800.00	99.38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.01.008.5.2.2.	Belanja Jasa Kantor	318,000,000.00	316,054,200.00	1,945,800.00	99.38	
4.00.02.4.00.02.02.01.008.5.2.2.03.0	Belanja Jasa pihak ketiga	318,000,000.00	316,054,200.00	1,945,800.00	99.38	
4.00.02.4.00.02.02.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	148,100,000.00	113,034,541.00	35,065,459.00	76.32	
4.00.02.4.00.02.02.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	148,100,000.00	113,034,541.00	35,065,459.00	76.32	
4.00.02.4.00.02.02.01.010.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	148,100,000.00	113,034,541.00	35,065,459.00	76.32	
4.00.02.4.00.02.02.01.010.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	148,100,000.00	113,034,541.00	35,065,459.00	76.32	
4.00.02.4.00.02.02.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	56,780,000.00	50,050,550.00	6,729,450.00	88.14	
4.00.02.4.00.02.02.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56,780,000.00	50,050,550.00	6,729,450.00	88.14	
4.00.02.4.00.02.02.01.011.5.2.2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	56,780,000.00	50,050,550.00	6,729,450.00	88.14	
4.00.02.4.00.02.02.01.011.5.2.2.06.0	Belanja cetak	56,780,000.00	50,050,550.00	6,729,450.00	88.14	
4.00.02.4.00.02.02.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	45,998,600.00	45,339,600.00	659,000.00	98.56	
4.00.02.4.00.02.02.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45,998,600.00	45,339,600.00	659,000.00	98.56	
4.00.02.4.00.02.02.01.012.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	45,998,600.00	45,339,600.00	659,000.00	98.56	
4.00.02.4.00.02.02.01.012.5.2.2.01.0	Belanja alat listrik dan elektronik	45,998,600.00	45,339,600.00	659,000.00	98.56	
4.00.02.4.00.02.02.01.013.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	237,000,000.00	227,716,200.00	9,283,800.00	96.08	
4.00.02.4.00.02.02.01.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	111,200,000.00	106,784,000.00	4,416,000.00	96.02	
4.00.02.4.00.02.02.01.013.5.2.2.	Belanja Jasa Kantor	91,200,000.00	87,600,000.00	3,600,000.00	96.05	
4.00.02.4.00.02.02.01.013.5.2.2.03.0	Belanja Jasa Tenaga kerja	91,200,000.00	87,600,000.00	3,600,000.00	96.05	
4.00.02.4.00.02.02.01.013.5.2.2.	Belanja Barang Inventaris	20,000,000.00	19,184,000.00	816,000.00	95.92	
4.00.02.4.00.02.02.01.013.5.2.2.25.0	Belanja Perlengkapan Kantor	20,000,000.00	19,184,000.00	816,000.00	95.92	

Subid_Akuntansi BKD Kab.Buleleng / Admin Pelaporan SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.01.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	125,800,000.00	120,932,200.00	4,867,800.00	96.13	
4.00.02.4.00.02.02.01.013.5.2.3.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	27,800,000.00	24,377,700.00	3,422,300.00	87.68	
4.00.02.4.00.02.02.01.013.5.2.3.10.0	Belanja modal Pengadaan mesin tik	7,000,000.00	6,204,000.00	796,000.00	88.62	
4.00.02.4.00.02.02.01.013.5.2.3.10.0	Belanja modal pengadaan mesin genset/pompa	10,000,000.00	9,973,700.00	26,300.00	99.73	
4.00.02.4.00.02.02.01.013.5.2.3.10.0	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Keamanan Informasi	10,800,000.00	8,200,000.00	2,600,000.00	75.92	
4.00.02.4.00.02.02.01.013.5.2.3.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	25,000,000.00	24,943,000.00	57,000.00	99.77	
4.00.02.4.00.02.02.01.013.5.2.3.11.0	Belanja modal pengadaan Alat Pendingin	20,000,000.00	19,943,000.00	57,000.00	99.71	
4.00.02.4.00.02.02.01.013.5.2.3.11.0	Belanja Modal Pengadaan Kerangka Baliho	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.01.013.5.2.3.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17,000,000.00	16,503,500.00	496,500.00	97.07	
4.00.02.4.00.02.02.01.013.5.2.3.12.0	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	10,000,000.00	9,503,500.00	496,500.00	95.03	
4.00.02.4.00.02.02.01.013.5.2.3.12.0	Belanja modal Pengadaan printer	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.01.013.5.2.3.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	16,000,000.00	16,000,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.01.013.5.2.3.15.0	Belanja modal Pengadaan lampu hias	16,000,000.00	16,000,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.01.013.5.2.3.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	30,000,000.00	30,000,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.01.013.5.2.3.17.0	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	30,000,000.00	30,000,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.01.013.5.2.3.	Belanja Modal sarana dan prasarana kebersihan / pertamanan	10,000,000.00	9,108,000.00	892,000.00	91.08	
4.00.02.4.00.02.02.01.013.5.2.3.35.0	Belanja Modal sarana dan prasarana pertamanan	10,000,000.00	9,108,000.00	892,000.00	91.08	
4.00.02.4.00.02.02.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	173,184,000.00	173,184,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	173,184,000.00	173,184,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.01.015.5.2.2.	Belanja Jasa Kantor	173,184,000.00	173,184,000.00	-	100.0	

Subid_Akuntansi BKD Kab.Buleleng / Admin Pelaporan SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.01.015.5.2.2.03.0	Belanja surat kabar/majalah	173,184,000.00	173,184,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	953,000,000.00	862,960,800.00	90,039,200.00	90.55	
4.00.02.4.00.02.02.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	953,000,000.00	862,960,800.00	90,039,200.00	90.55	
4.00.02.4.00.02.02.01.017.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000.00	2,938,000.00	62,000.00	97.93	
4.00.02.4.00.02.02.01.017.5.2.2.01.0	Belanja pengisian tabung gas	3,000,000.00	2,938,000.00	62,000.00	97.93	
4.00.02.4.00.02.02.01.017.5.2.2.	Belanja Makanan dan Minuman	470,000,000.00	460,629,000.00	9,371,000.00	98.00	
4.00.02.4.00.02.02.01.017.5.2.2.11.0	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	110,000,000.00	101,684,000.00	8,316,000.00	92.44	
4.00.02.4.00.02.02.01.017.5.2.2.11.0	Belanja makanan dan minuman tamu	360,000,000.00	358,945,000.00	1,055,000.00	99.70	
4.00.02.4.00.02.02.01.017.5.2.2.	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	480,000,000.00	399,393,800.00	80,606,200.00	83.20	
4.00.02.4.00.02.02.01.017.5.2.2.36.0	Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga Pimpinan DPRD	480,000,000.00	399,393,800.00	80,606,200.00	83.20	
4.00.02.4.00.02.02.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH/DALAM DAERAH	13,545,916,000.	13,441,415,114.00	104,500,886.00	99.22	
4.00.02.4.00.02.02.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13,545,916,000.	13,441,415,114.00	104,500,886.00	99.22	
4.00.02.4.00.02.02.01.018.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	37,711,500.00	29,826,915.00	7,884,585.00	79.09	
4.00.02.4.00.02.02.01.018.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	37,711,500.00	29,826,915.00	7,884,585.00	79.09	
4.00.02.4.00.02.02.01.018.5.2.2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,000,000.00	9,000,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.01.018.5.2.2.06.0	Belanja Foto copy	9,000,000.00	9,000,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.01.018.5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	13,499,204,500.	13,402,588,199.00	96,616,301.00	99.28	
4.00.02.4.00.02.02.01.018.5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90,000,000.00	89,669,000.00	331,000.00	99.63	
4.00.02.4.00.02.02.01.018.5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13,409,204,500.00	13,312,919,199.00	96,285,301.00	99.28	
4.00.02.4.00.02.02.01.019.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN	47,395,000.00	8,981,350.00	38,413,650.00	18.94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47,395,000.00	8,981,350.00	38,413,650.00	18.94	
4.00.02.4.00.02.02.01.019.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,395,000.00	1,703,350.00	691,650.00	71.12	
4.00.02.4.00.02.02.01.019.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	2,311,000.00	1,703,350.00	607,650.00	73.70	
4.00.02.4.00.02.02.01.019.5.2.2.01.0	Belanja perangko, materai dan benda pos	84,000.00	-	84,000.00	-	
4.00.02.4.00.02.02.01.019.5.2.2.	Belanja Jasa Kantor	45,000,000.00	7,278,000.00	37,722,000.00	16.17	
4.00.02.4.00.02.02.01.019.5.2.2.03.0	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	45,000,000.00	7,278,000.00	37,722,000.00	16.17	
4.00.02.4.00.02.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2,299,209,100.0	2,239,407,659.45	59,801,440.55	97.39	
4.00.02.4.00.02.02.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25,000,000.00	23,300,000.00	1,700,000.00	93.20	
4.00.02.4.00.02.02.02.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	25,000,000.00	23,300,000.00	1,700,000.00	93.20	
4.00.02.4.00.02.02.02.005.5.2.3.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	25,000,000.00	23,300,000.00	1,700,000.00	93.20	
4.00.02.4.00.02.02.02.005.5.2.3.03.0	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	25,000,000.00	23,300,000.00	1,700,000.00	93.20	
4.00.02.4.00.02.02.02.012.	PENYELENGGARAAN DAN PENGADAAN SARANA/PRASARANA UPACARA	639,950,000.00	628,606,400.00	11,343,600.00	98.22	
4.00.02.4.00.02.02.02.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	639,950,000.00	628,606,400.00	11,343,600.00	98.22	
4.00.02.4.00.02.02.02.012.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	619,550,000.00	608,221,400.00	11,328,600.00	98.17	
4.00.02.4.00.02.02.02.012.5.2.2.01.0	Belanja Kain Kelengkapan Upacara	21,000,000.00	20,800,000.00	200,000.00	99.04	
4.00.02.4.00.02.02.02.012.5.2.2.01.0	Belanja Sesajen	586,550,000.00	575,442,400.00	11,107,600.00	98.10	
4.00.02.4.00.02.02.02.012.5.2.2.01.0	Belanja bahan kelengkapan upacara	12,000,000.00	11,979,000.00	21,000.00	99.82	
4.00.02.4.00.02.02.02.012.5.2.2.	Belanja Bahan/Material	6,000,000.00	5,985,000.00	15,000.00	99.75	
4.00.02.4.00.02.02.02.012.5.2.2.02.0	Belanja bahan dekorasi	6,000,000.00	5,985,000.00	15,000.00	99.75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.02.012.5.2.2.	Belanja Jasa Kantor	14,400,000.00	14,400,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.02.012.5.2.2.03.0	Belanja Jasa Kesenian	14,400,000.00	14,400,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.02.020.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	274,350,000.00	272,974,000.00	1,376,000.00	99.49	
4.00.02.4.00.02.02.02.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	274,350,000.00	272,974,000.00	1,376,000.00	99.49	
4.00.02.4.00.02.02.02.020.5.2.2.	Belanja Jasa Kantor	188,350,000.00	187,740,000.00	610,000.00	99.67	
4.00.02.4.00.02.02.02.020.5.2.2.03.0	Belanja Jasa Tenaga kerja	188,350,000.00	187,740,000.00	610,000.00	99.67	
4.00.02.4.00.02.02.02.020.5.2.2.	Belanja Pemeliharaan	86,000,000.00	85,234,000.00	766,000.00	99.10	
4.00.02.4.00.02.02.02.020.5.2.2.20.0	Belanja Pemeliharaan Gedung/Lingkungan Kantor	86,000,000.00	85,234,000.00	766,000.00	99.10	
4.00.02.4.00.02.02.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	470,200,000.00	464,695,585.45	5,504,414.55	98.82	
4.00.02.4.00.02.02.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	352,700,000.00	351,187,000.00	1,513,000.00	99.57	
4.00.02.4.00.02.02.02.022.5.2.2.	Belanja Jasa Kantor	277,200,000.00	276,862,000.00	338,000.00	99.87	
4.00.02.4.00.02.02.02.022.5.2.2.03.0	Belanja Jasa Tenaga kerja	277,200,000.00	276,862,000.00	338,000.00	99.87	
4.00.02.4.00.02.02.02.022.5.2.2.	Belanja Pemeliharaan	75,500,000.00	74,325,000.00	1,175,000.00	98.44	
4.00.02.4.00.02.02.02.022.5.2.2.20.0	Belanja Pemeliharaan Gedung/Lingkungan Kantor	75,500,000.00	74,325,000.00	1,175,000.00	98.44	
4.00.02.4.00.02.02.02.022.5.2.3.	BELANJA MODAL	117,500,000.00	113,508,585.45	3,991,414.55	96.60	
4.00.02.4.00.02.02.02.022.5.2.3.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	117,500,000.00	113,508,585.45	3,991,414.55	96.60	
4.00.02.4.00.02.02.02.022.5.2.3.26.0	Belanja modal pengadaan konstruksi tempat sembahyang	17,500,000.00	16,883,000.00	617,000.00	96.47	
4.00.02.4.00.02.02.02.022.5.2.3.26.0	Belanja Modal Pengadaan Interior Gedung	100,000,000.00	96,625,585.45	3,374,414.55	96.62	
4.00.02.4.00.02.02.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	749,709,100.00	718,621,874.00	31,087,226.00	95.85	

Subid_Akuntansi BKD Kab.Buleleng / Admin Pelaporan SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	749,709,100.00	718,621,874.00	31,087,226.00	95.85	
4.00.02.4.00.02.02.02.024.5.2.2.	Belanja Jasa Kantor	319,500,000.00	304,408,000.00	15,092,000.00	95.27	
4.00.02.4.00.02.02.02.024.5.2.2.03.0	Belanja Jasa Tenaga kerja	319,500,000.00	304,408,000.00	15,092,000.00	95.27	
4.00.02.4.00.02.02.02.024.5.2.2.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	228,100,000.00	220,268,724.00	7,831,276.00	96.56	
4.00.02.4.00.02.02.02.024.5.2.2.05.0	Belanja Jasa Service	100,000,000.00	99,766,350.00	233,650.00	99.76	
4.00.02.4.00.02.02.02.024.5.2.2.05.0	Belanja Penggantian Suku Cadang	108,100,000.00	107,803,624.00	296,376.00	99.72	
4.00.02.4.00.02.02.02.024.5.2.2.05.0	Belanja Pelumas	20,000,000.00	12,698,750.00	7,301,250.00	63.49	
4.00.02.4.00.02.02.02.024.5.2.2.	Belanja Operasional Kendaraan	202,109,100.00	193,945,150.00	8,163,950.00	95.96	
4.00.02.4.00.02.02.02.024.5.2.2.32.0	Belanja Bahan Bakar Minyak	202,109,100.00	193,945,150.00	8,163,950.00	95.96	
4.00.02.4.00.02.02.02.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	104,000,000.00	96,082,000.00	7,918,000.00	92.38	
4.00.02.4.00.02.02.02.02.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	104,000,000.00	96,082,000.00	7,918,000.00	92.38	
4.00.02.4.00.02.02.02.02.026.5.2.2.	Belanja Pemeliharaan	104,000,000.00	96,082,000.00	7,918,000.00	92.38	
4.00.02.4.00.02.02.02.02.026.5.2.2.20.0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104,000,000.00	96,082,000.00	7,918,000.00	92.38	
4.00.02.4.00.02.02.02.02.054.	PARTISIPASI DALAM RANGKA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL/DAERAH DAN PELAKSANAAN EVENT NASIONAL/DAERAH	36,000,000.00	35,127,800.00	872,200.00	97.57	
4.00.02.4.00.02.02.02.02.054.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36,000,000.00	35,127,800.00	872,200.00	97.57	
4.00.02.4.00.02.02.02.02.054.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,408,200.00	1,155,000.00	253,200.00	82.01	
4.00.02.4.00.02.02.02.02.054.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	1,408,200.00	1,155,000.00	253,200.00	82.01	
4.00.02.4.00.02.02.02.02.054.5.2.2.	Belanja Jasa Kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.02.02.054.5.2.2.03.0	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.02.054.5.2.2.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31,350,000.00	30,972,800.00	377,200.00	98.79	
4.00.02.4.00.02.02.02.054.5.2.2.14.0	Belanja pakaian olah raga	31,350,000.00	30,972,800.00	377,200.00	98.79	
4.00.02.4.00.02.02.02.054.5.2.2.	Belanja Operasional Kendaraan	241,800.00	-	241,800.00	-	
4.00.02.4.00.02.02.02.054.5.2.2.32.0	Belanja Bahan Bakar Minyak	241,800.00	-	241,800.00	-	
4.00.02.4.00.02.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	483,500,000.00	470,978,750.00	12,521,250.00	97.41	
4.00.02.4.00.02.02.03.002.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	443,750,000.00	431,228,750.00	12,521,250.00	97.17	
4.00.02.4.00.02.02.03.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	443,750,000.00	431,228,750.00	12,521,250.00	97.17	
4.00.02.4.00.02.02.03.002.5.2.2.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	443,750,000.00	431,228,750.00	12,521,250.00	97.17	
4.00.02.4.00.02.02.03.002.5.2.2.12.0	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	72,000,000.00	69,300,000.00	2,700,000.00	96.25	
4.00.02.4.00.02.02.03.002.5.2.2.12.0	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	281,750,000.00	272,828,750.00	8,921,250.00	96.83	
4.00.02.4.00.02.02.03.002.5.2.2.12.0	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	90,000,000.00	89,100,000.00	900,000.00	99.00	
4.00.02.4.00.02.02.03.003.	PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	6,750,000.00	6,750,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.03.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6,750,000.00	6,750,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.03.003.5.2.2.	Belanja Pakaian Kerja	6,750,000.00	6,750,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.03.003.5.2.2.13.0	Belanja pakaian kerja lapangan	6,750,000.00	6,750,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.03.005.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	33,000,000.00	33,000,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.03.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33,000,000.00	33,000,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.03.005.5.2.2.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33,000,000.00	33,000,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.03.005.5.2.2.14.0	Belanja pakaian adat daerah	33,000,000.00	33,000,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	2,629,991,500.0	2,550,298,585.00	79,692,915.00	96.96	

Subid_Akuntansi BKD Kab.Buleleng / Admin Pelaporan SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.05.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	524,132,000.00	523,178,480.00	953,520.00	99.81	
4.00.02.4.00.02.02.05.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	524,132,000.00	523,178,480.00	953,520.00	99.81	
4.00.02.4.00.02.02.05.001.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,629,500.00	2,880,840.00	748,660.00	79.37	
4.00.02.4.00.02.02.05.001.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	3,629,500.00	2,880,840.00	748,660.00	79.37	
4.00.02.4.00.02.02.05.001.5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	519,072,800.00	519,001,640.00	71,160.00	99.98	
4.00.02.4.00.02.02.05.001.5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas luar daerah	519,072,800.00	519,001,640.00	71,160.00	99.98	
4.00.02.4.00.02.02.05.001.5.2.2.	Belanja Operasional Kendaraan	1,429,700.00	1,296,000.00	133,700.00	90.64	
4.00.02.4.00.02.02.05.001.5.2.2.32.0	Belanja Bahan Bakar Minyak	1,429,700.00	1,296,000.00	133,700.00	90.64	
4.00.02.4.00.02.02.05.002.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1,152,623,000.0	1,097,929,130.00	54,693,870.00	95.25	
4.00.02.4.00.02.02.05.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18,600,000.00	15,500,000.00	3,100,000.00	83.33	
4.00.02.4.00.02.02.05.002.5.2.1.	Uang Lembur	18,600,000.00	15,500,000.00	3,100,000.00	83.33	
4.00.02.4.00.02.02.05.002.5.2.1.03.0	Uang Lembur PNS	18,600,000.00	15,500,000.00	3,100,000.00	83.33	
4.00.02.4.00.02.02.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1,134,023,000.0	1,082,429,130.00	51,593,870.00	95.45	
4.00.02.4.00.02.02.05.002.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	14,815,600.00	12,556,630.00	2,258,970.00	84.75	
4.00.02.4.00.02.02.05.002.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	12,475,600.00	10,216,630.00	2,258,970.00	81.89	
4.00.02.4.00.02.02.05.002.5.2.2.01.0	Belanja perangko, materai dan benda pos	2,340,000.00	2,340,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.05.002.5.2.2.	Belanja Jasa Kantor	943,584,000.00	905,984,000.00	37,600,000.00	96.01	
4.00.02.4.00.02.02.05.002.5.2.2.03.0	Belanja Jasa Tenaga kerja	77,184,000.00	77,184,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.05.002.5.2.2.03.0	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	866,400,000.00	828,800,000.00	37,600,000.00	95.66	
4.00.02.4.00.02.02.05.002.5.2.2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24,000,000.00	21,281,000.00	2,719,000.00	88.67	
4.00.02.4.00.02.02.05.002.5.2.2.06.0	Belanja cetak	13,600,000.00	11,078,000.00	2,522,000.00	81.45	

Subid_Akuntansi BKD Kab.Buleleng / Admin Pelaporan SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.05.002.5.2.2.06.0	Belanja Foto copy	10,400,000.00	10,203,000.00	197,000.00	98.10	
4.00.02.4.00.02.02.05.002.5.2.2.	Belanja Makanan dan Minuman	4,200,000.00	-	4,200,000.00	-	
4.00.02.4.00.02.02.05.002.5.2.2.11.0	Belanja makanan dan minuman rapat	4,200,000.00	-	4,200,000.00	-	
4.00.02.4.00.02.02.05.002.5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	145,250,000.00	140,543,200.00	4,706,800.00	96.75	
4.00.02.4.00.02.02.05.002.5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,500,000.00	16,350,000.00	150,000.00	99.09	
4.00.02.4.00.02.02.05.002.5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas luar daerah	128,750,000.00	124,193,200.00	4,556,800.00	96.46	
4.00.02.4.00.02.02.05.002.5.2.2.	Belanja Operasional Kendaraan	2,173,400.00	2,064,300.00	109,100.00	94.98	
4.00.02.4.00.02.02.05.002.5.2.2.32.0	Belanja Bahan Bakar Minyak	2,173,400.00	2,064,300.00	109,100.00	94.98	
4.00.02.4.00.02.02.05.003.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	359,350,000.00	336,872,500.00	22,477,500.00	93.74	
4.00.02.4.00.02.02.05.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	359,350,000.00	336,872,500.00	22,477,500.00	93.74	
4.00.02.4.00.02.02.05.003.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	450,000.00	450,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.05.003.5.2.2.01.0	Belanja perangko, materai dan benda pos	450,000.00	450,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.05.003.5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	254,400,000.00	231,922,500.00	22,477,500.00	91.16	
4.00.02.4.00.02.02.05.003.5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,450,000.00	6,850,000.00	3,600,000.00	65.55	
4.00.02.4.00.02.02.05.003.5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas luar daerah	243,950,000.00	225,072,500.00	18,877,500.00	92.26	
4.00.02.4.00.02.02.05.003.5.2.2.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	104,500,000.00	104,500,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.05.003.5.2.2.17.0	Belanja Kontribusi	104,500,000.00	104,500,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.05.005.	PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	593,886,500.00	592,318,475.00	1,568,025.00	99.73	
4.00.02.4.00.02.02.05.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31,500,000.00	31,465,000.00	35,000.00	99.88	
4.00.02.4.00.02.02.05.005.5.2.1.	Uang Lembur	31,500,000.00	31,465,000.00	35,000.00	99.88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.05.005.5.2.1.03.0	Uang Lembur PNS	31,500,000.00	31,465,000.00	35,000.00	99.88	
4.00.02.4.00.02.02.05.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	562,386,500.00	560,853,475.00	1,533,025.00	99.72	
4.00.02.4.00.02.02.05.005.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	4,860,200.00	3,851,475.00	1,008,725.00	79.24	
4.00.02.4.00.02.02.05.005.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	4,860,200.00	3,851,475.00	1,008,725.00	79.24	
4.00.02.4.00.02.02.05.005.5.2.2.	Belanja Jasa Kantor	528,816,000.00	528,486,000.00	330,000.00	99.93	
4.00.02.4.00.02.02.05.005.5.2.2.03.0	Belanja Jasa Tenaga kerja	528,816,000.00	528,486,000.00	330,000.00	99.93	
4.00.02.4.00.02.02.05.005.5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	28,710,300.00	28,516,000.00	194,300.00	99.32	
4.00.02.4.00.02.02.05.005.5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,710,300.00	28,516,000.00	194,300.00	99.32	
4.00.02.4.00.02.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	269,300,000.00	264,022,615.00	5,277,385.00	98.04	
4.00.02.4.00.02.02.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	269,300,000.00	264,022,615.00	5,277,385.00	98.04	
4.00.02.4.00.02.02.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	120,960,000.00	120,960,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.06.001.5.2.1.	Uang Lembur	120,960,000.00	120,960,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.06.001.5.2.1.03.0	Uang Lembur PNS	120,960,000.00	120,960,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	148,340,000.00	143,062,615.00	5,277,385.00	96.44	
4.00.02.4.00.02.02.06.001.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	39,452,800.00	34,189,215.00	5,263,585.00	86.65	
4.00.02.4.00.02.02.06.001.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	38,702,800.00	33,439,215.00	5,263,585.00	86.39	
4.00.02.4.00.02.02.06.001.5.2.2.01.0	Belanja perangko, materai dan benda pos	750,000.00	750,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.06.001.5.2.2.	Belanja Jasa Kantor	61,968,000.00	61,968,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.06.001.5.2.2.03.0	Belanja Jasa Tenaga kerja	61,968,000.00	61,968,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.06.001.5.2.2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,454,000.00	12,454,000.00	-	100.0	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.06.001.5.2.2.06.0	Belanja cetak	12,454,000.00	12,454,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.06.001.5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.06.001.5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.06.001.5.2.2.	Belanja Operasional Kendaraan	9,465,200.00	9,451,400.00	13,800.00	99.85	
4.00.02.4.00.02.02.06.001.5.2.2.32.0	Belanja Bahan Bakar Minyak	9,465,200.00	9,451,400.00	13,800.00	99.85	
4.00.02.4.00.02.02.07.	PROGRAM PERENCANAAN ANGGARAN SKPD	259,534,000.00	253,756,970.00	5,777,030.00	97.77	
4.00.02.4.00.02.02.07.001.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	259,534,000.00	253,756,970.00	5,777,030.00	97.77	
4.00.02.4.00.02.02.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	132,840,000.00	132,765,000.00	75,000.00	99.94	
4.00.02.4.00.02.02.07.001.5.2.1.	Honorarium PNS	72,000,000.00	72,000,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.07.001.5.2.1.01.0	Honorarium Petugas Teknis	72,000,000.00	72,000,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.07.001.5.2.1.	Uang Lembur	60,840,000.00	60,765,000.00	75,000.00	99.87	
4.00.02.4.00.02.02.07.001.5.2.1.03.0	Uang Lembur PNS	60,840,000.00	60,765,000.00	75,000.00	99.87	
4.00.02.4.00.02.02.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	126,694,000.00	120,991,970.00	5,702,030.00	95.49	
4.00.02.4.00.02.02.07.001.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	32,611,200.00	27,463,670.00	5,147,530.00	84.21	
4.00.02.4.00.02.02.07.001.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	31,801,200.00	26,653,670.00	5,147,530.00	83.81	
4.00.02.4.00.02.02.07.001.5.2.2.01.0	Belanja perangko, materai dan benda pos	810,000.00	810,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.07.001.5.2.2.	Belanja Jasa Kantor	67,680,000.00	67,680,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.07.001.5.2.2.03.0	Belanja Jasa Tenaga kerja	67,680,000.00	67,680,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.07.001.5.2.2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00	2,934,400.00	65,600.00	97.81	
4.00.02.4.00.02.02.07.001.5.2.2.06.0	Belanja Foto copy	3,000,000.00	2,934,400.00	65,600.00	97.81	
4.00.02.4.00.02.02.07.001.5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000.00	9,525,000.00	475,000.00	95.25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.07.001.5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00	9,525,000.00	475,000.00	95.25	
4.00.02.4.00.02.02.07.001.5.2.2.	Belanja Operasional Kendaraan	13,402,800.00	13,388,900.00	13,900.00	99.89	
4.00.02.4.00.02.02.07.001.5.2.2.32.0	Belanja Bahan Bakar Minyak	13,402,800.00	13,388,900.00	13,900.00	99.89	
4.00.02.4.00.02.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	18,777,094,700.	18,500,475,604.00	276,619,096.00	98.52	
4.00.02.4.00.02.02.15.001.	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	3,302,850,000.0	3,258,979,294.00	43,870,706.00	98.67	
4.00.02.4.00.02.02.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	80,304,000.00	79,564,000.00	740,000.00	99.07	
4.00.02.4.00.02.02.15.001.5.2.1.	Honorarium PNS	43,104,000.00	42,554,000.00	550,000.00	98.72	
4.00.02.4.00.02.02.15.001.5.2.1.01.0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43,104,000.00	42,554,000.00	550,000.00	98.72	
4.00.02.4.00.02.02.15.001.5.2.1.	Uang Lembur	37,200,000.00	37,010,000.00	190,000.00	99.48	
4.00.02.4.00.02.02.15.001.5.2.1.03.0	Uang Lembur PNS	37,200,000.00	37,010,000.00	190,000.00	99.48	
4.00.02.4.00.02.02.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3,222,546,000.0	3,179,415,294.00	43,130,706.00	98.66	
4.00.02.4.00.02.02.15.001.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	29,754,900.00	24,227,450.00	5,527,450.00	81.42	
4.00.02.4.00.02.02.15.001.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	27,984,900.00	22,457,450.00	5,527,450.00	80.24	
4.00.02.4.00.02.02.15.001.5.2.2.01.0	Belanja perangko, materai dan benda pos	1,770,000.00	1,770,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.15.001.5.2.2.	Belanja Jasa Kantor	38,064,000.00	38,064,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.15.001.5.2.2.03.0	Belanja Jasa Tenaga kerja	38,064,000.00	38,064,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.15.001.5.2.2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	50,000,000.00	48,236,300.00	1,763,700.00	96.47	
4.00.02.4.00.02.02.15.001.5.2.2.06.0	Belanja cetak	39,000,000.00	37,267,500.00	1,732,500.00	95.55	
4.00.02.4.00.02.02.15.001.5.2.2.06.0	Belanja Foto copy	11,000,000.00	10,968,800.00	31,200.00	99.71	
4.00.02.4.00.02.02.15.001.5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	3,094,727,100.0	3,059,268,794.00	35,458,306.00	98.85	
4.00.02.4.00.02.02.15.001.5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	147,347,100.00	112,707,000.00	34,640,100.00	76.49	

Subid_Akuntansi BKD Kab.Buleleng / Admin Pelaporan SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.15.001.5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,947,380,000.00	2,946,561,794.00	818,206.00	99.97	
4.00.02.4.00.02.02.15.001.5.2.2.	Belanja Operasional Kendaraan	10,000,000.00	9,618,750.00	381,250.00	96.18	
4.00.02.4.00.02.02.15.001.5.2.2.32.0	Belanja Bahan Bakar Minyak	10,000,000.00	9,618,750.00	381,250.00	96.18	
4.00.02.4.00.02.02.15.002.	HEARING/ DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/ TOKOH AGAMA	34,169,000.00	16,637,900.00	17,531,100.00	48.69	
4.00.02.4.00.02.02.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34,169,000.00	16,637,900.00	17,531,100.00	48.69	
4.00.02.4.00.02.02.15.002.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	5,248,000.00	3,487,900.00	1,760,100.00	66.46	
4.00.02.4.00.02.02.15.002.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	4,498,000.00	2,737,900.00	1,760,100.00	60.86	
4.00.02.4.00.02.02.15.002.5.2.2.01.0	Belanja perangko, materai dan benda pos	750,000.00	750,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.15.002.5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	28,921,000.00	13,150,000.00	15,771,000.00	45.46	
4.00.02.4.00.02.02.15.002.5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,921,000.00	13,150,000.00	15,771,000.00	45.46	
4.00.02.4.00.02.02.15.003.	RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN	356,100,000.00	351,946,880.00	4,153,120.00	98.83	
4.00.02.4.00.02.02.15.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23,000,000.00	22,960,000.00	40,000.00	99.82	
4.00.02.4.00.02.02.15.003.5.2.1.	Uang Lembur	23,000,000.00	22,960,000.00	40,000.00	99.82	
4.00.02.4.00.02.02.15.003.5.2.1.03.0	Uang Lembur PNS	23,000,000.00	22,960,000.00	40,000.00	99.82	
4.00.02.4.00.02.02.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	333,100,000.00	328,986,880.00	4,113,120.00	98.76	
4.00.02.4.00.02.02.15.003.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	13,118,600.00	10,482,130.00	2,636,470.00	79.90	
4.00.02.4.00.02.02.15.003.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	12,218,600.00	9,582,130.00	2,636,470.00	78.42	
4.00.02.4.00.02.02.15.003.5.2.2.01.0	Belanja perangko, materai dan benda pos	900,000.00	900,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.15.003.5.2.2.	Belanja Jasa Kantor	114,216,000.00	113,712,000.00	504,000.00	99.55	
4.00.02.4.00.02.02.15.003.5.2.2.03.0	Belanja Jasa Tenaga kerja	114,216,000.00	113,712,000.00	504,000.00	99.55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.15.003.5.2.2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27,500,000.00	27,499,600.00	400.00	99.99	
4.00.02.4.00.02.02.15.003.5.2.2.06.0	Belanja cetak	19,500,000.00	19,500,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.15.003.5.2.2.06.0	Belanja Foto copy	8,000,000.00	7,999,600.00	400.00	99.99	
4.00.02.4.00.02.02.15.003.5.2.2.	Belanja Makanan dan Minuman	164,864,000.00	164,685,400.00	178,600.00	99.89	
4.00.02.4.00.02.02.15.003.5.2.2.11.0	Belanja makanan dan minuman rapat	164,864,000.00	164,685,400.00	178,600.00	99.89	
4.00.02.4.00.02.02.15.003.5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	8,650,000.00	8,475,000.00	175,000.00	97.97	
4.00.02.4.00.02.02.15.003.5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,650,000.00	8,475,000.00	175,000.00	97.97	
4.00.02.4.00.02.02.15.003.5.2.2.	Belanja Operasional Kendaraan	4,751,400.00	4,132,750.00	618,650.00	86.97	
4.00.02.4.00.02.02.15.003.5.2.2.32.0	Belanja Bahan Bakar Minyak	4,751,400.00	4,132,750.00	618,650.00	86.97	
4.00.02.4.00.02.02.15.004.	RAPAT-RAPAT PARIPURNA	218,073,100.00	216,197,100.00	1,876,000.00	99.13	
4.00.02.4.00.02.02.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	218,073,100.00	216,197,100.00	1,876,000.00	99.13	
4.00.02.4.00.02.02.15.004.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	4,945,400.00	3,959,000.00	986,400.00	80.05	
4.00.02.4.00.02.02.15.004.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	4,945,400.00	3,959,000.00	986,400.00	80.05	
4.00.02.4.00.02.02.15.004.5.2.2.	Belanja Bahan/Material	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.15.004.5.2.2.02.0	Belanja bahan dekorasi	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.15.004.5.2.2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,037,600.00	12,823,200.00	214,400.00	98.35	
4.00.02.4.00.02.02.15.004.5.2.2.06.0	Belanja cetak	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.15.004.5.2.2.06.0	Belanja Foto copy	7,037,600.00	6,823,200.00	214,400.00	96.95	
4.00.02.4.00.02.02.15.004.5.2.2.	Belanja Makanan dan Minuman	187,590,000.00	187,489,900.00	100,100.00	99.94	
4.00.02.4.00.02.02.15.004.5.2.2.11.0	Belanja makanan dan minuman rapat	187,590,000.00	187,489,900.00	100,100.00	99.94	
4.00.02.4.00.02.02.15.004.5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	8,000,100.00	7,425,000.00	575,100.00	92.81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.15.004.5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,000,100.00	7,425,000.00	575,100.00	92.81	
4.00.02.4.00.02.02.15.005.	KEGIATAN RESES	2,845,670,000.0	2,835,894,710.00	9,775,290.00	99.65	
4.00.02.4.00.02.02.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2,845,670,000.0	2,835,894,710.00	9,775,290.00	99.65	
4.00.02.4.00.02.02.15.005.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	33,845,000.00	25,669,710.00	8,175,290.00	75.84	
4.00.02.4.00.02.02.15.005.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	27,545,000.00	19,369,710.00	8,175,290.00	70.32	
4.00.02.4.00.02.02.15.005.5.2.2.01.0	Belanja perangko, materai dan benda pos	6,300,000.00	6,300,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.15.005.5.2.2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.15.005.5.2.2.06.0	Belanja Foto copy	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.15.005.5.2.2.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	540,000,000.00	540,000,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.15.005.5.2.2.07.0	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	540,000,000.00	540,000,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.15.005.5.2.2.	Belanja Makanan dan Minuman	2,160,000,000.0	2,160,000,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.15.005.5.2.2.11.0	Belanja makanan dan minuman rapat	2,160,000,000.00	2,160,000,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.15.005.5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	105,825,000.00	104,225,000.00	1,600,000.00	98.48	
4.00.02.4.00.02.02.15.005.5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	105,825,000.00	104,225,000.00	1,600,000.00	98.48	
4.00.02.4.00.02.02.15.006.	KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH	326,111,000.00	305,822,900.00	20,288,100.00	93.77	
4.00.02.4.00.02.02.15.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39,060,000.00	36,090,000.00	2,970,000.00	92.39	
4.00.02.4.00.02.02.15.006.5.2.1.	Uang Lembur	39,060,000.00	36,090,000.00	2,970,000.00	92.39	
4.00.02.4.00.02.02.15.006.5.2.1.03.0	Uang Lembur PNS	39,060,000.00	36,090,000.00	2,970,000.00	92.39	
4.00.02.4.00.02.02.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	287,051,000.00	269,732,900.00	17,318,100.00	93.96	
4.00.02.4.00.02.02.15.006.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	5,964,500.00	4,818,950.00	1,145,550.00	80.79	
4.00.02.4.00.02.02.15.006.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	4,614,500.00	3,468,950.00	1,145,550.00	75.17	

Subid_Akuntansi BKD Kab.Buleleng / Admin Pelaporan SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.15.006.5.2.2.01.0	Belanja perangko, materai dan benda pos	1,350,000.00	1,350,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.15.006.5.2.2.	Belanja Jasa Kantor	82,656,000.00	81,624,000.00	1,032,000.00	98.75	
4.00.02.4.00.02.02.15.006.5.2.2.03.0	Belanja Jasa Tenaga kerja	82,656,000.00	81,624,000.00	1,032,000.00	98.75	
4.00.02.4.00.02.02.15.006.5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	160,577,500.00	158,878,000.00	1,699,500.00	98.94	
4.00.02.4.00.02.02.15.006.5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	160,577,500.00	158,878,000.00	1,699,500.00	98.94	
4.00.02.4.00.02.02.15.006.5.2.2.	Belanja Operasional Kendaraan	37,853,000.00	24,411,950.00	13,441,050.00	64.49	
4.00.02.4.00.02.02.15.006.5.2.2.32.0	Belanja Bahan Bakar Minyak	37,853,000.00	24,411,950.00	13,441,050.00	64.49	
4.00.02.4.00.02.02.15.007.	PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	11,694,121,600.	11,514,996,820.00	179,124,780.00	98.46	
4.00.02.4.00.02.02.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11,694,121,600.	11,514,996,820.00	179,124,780.00	98.46	
4.00.02.4.00.02.02.15.007.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	20,459,800.00	17,540,805.00	2,918,995.00	85.73	
4.00.02.4.00.02.02.15.007.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	17,159,800.00	14,240,805.00	2,918,995.00	82.98	
4.00.02.4.00.02.02.15.007.5.2.2.01.0	Belanja perangko, materai dan benda pos	3,300,000.00	3,300,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.15.007.5.2.2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,097,200.00	6,097,200.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.15.007.5.2.2.06.0	Belanja Foto copy	6,097,200.00	6,097,200.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.15.007.5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	11,327,564,600.	11,151,358,815.00	176,205,785.00	98.44	
4.00.02.4.00.02.02.15.007.5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	150,000,000.00	147,853,500.00	2,146,500.00	98.56	
4.00.02.4.00.02.02.15.007.5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,933,564,600.00	10,931,119,835.00	2,444,765.00	99.97	
4.00.02.4.00.02.02.15.007.5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas luar negeri	244,000,000.00	72,385,480.00	171,614,520.00	29.66	
4.00.02.4.00.02.02.15.007.5.2.2.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	340,000,000.00	340,000,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.15.007.5.2.2.35.0	Belanja Kontribusi	340,000,000.00	340,000,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.16.	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PEMBERITAAN PEMBANGUNAN, PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN DAN KEPROTOKOLAN	1,079,360,000.0	1,027,503,760.00	51,856,240.00	95.19	
4.00.02.4.00.02.02.16.001.	PUBLIKASI PEMBANGUNAN, PEMERINTAH DAN KEMASYARAKATAN	703,800,000.00	670,396,650.00	33,403,350.00	95.25	
4.00.02.4.00.02.02.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42,000,000.00	37,860,000.00	4,140,000.00	90.14	
4.00.02.4.00.02.02.16.001.5.2.1.	Honorarium PNS	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.16.001.5.2.1.01.0	Honorarium Petugas Teknis	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.16.001.5.2.1.	Uang Lembur	36,000,000.00	31,860,000.00	4,140,000.00	88.50	
4.00.02.4.00.02.02.16.001.5.2.1.03.0	Uang Lembur PNS	36,000,000.00	31,860,000.00	4,140,000.00	88.50	
4.00.02.4.00.02.02.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	661,800,000.00	632,536,650.00	29,263,350.00	95.57	
4.00.02.4.00.02.02.16.001.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	14,573,800.00	11,885,260.00	2,688,540.00	81.55	
4.00.02.4.00.02.02.16.001.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	12,773,800.00	10,235,260.00	2,538,540.00	80.12	
4.00.02.4.00.02.02.16.001.5.2.2.01.0	Belanja perangko, materai dan benda pos	1,800,000.00	1,650,000.00	150,000.00	91.66	
4.00.02.4.00.02.02.16.001.5.2.2.	Belanja Jasa Kantor	606,088,000.00	589,071,440.00	17,016,560.00	97.19	
4.00.02.4.00.02.02.16.001.5.2.2.03.0	Belanja Jasa Tenaga kerja	97,488,000.00	96,384,000.00	1,104,000.00	98.86	
4.00.02.4.00.02.02.16.001.5.2.2.03.0	Belanja Jasa Dokumentasi	1,600,000.00	800,000.00	800,000.00	50.00	
4.00.02.4.00.02.02.16.001.5.2.2.03.0	Belanja Jasa Dekorasi	107,000,000.00	105,547,440.00	1,452,560.00	98.64	
4.00.02.4.00.02.02.16.001.5.2.2.03.0	Belanja Jasa Publikasi	400,000,000.00	386,340,000.00	13,660,000.00	96.58	
4.00.02.4.00.02.02.16.001.5.2.2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32,500,000.00	26,270,000.00	6,230,000.00	80.83	
4.00.02.4.00.02.02.16.001.5.2.2.06.0	Belanja cetak	32,500,000.00	26,270,000.00	6,230,000.00	80.83	
4.00.02.4.00.02.02.16.001.5.2.2.	Belanja Operasional Kendaraan	8,638,200.00	5,309,950.00	3,328,250.00	61.47	
4.00.02.4.00.02.02.16.001.5.2.2.32.0	Belanja Bahan Bakar Minyak	8,638,200.00	5,309,950.00	3,328,250.00	61.47	

Subid_Akuntansi BKD Kab.Buleleng / Admin Pelaporan SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.16.002.	PELAKSANAAN JUMPA PERS	80,186,000.00	75,250,910.00	4,935,090.00	93.84	
4.00.02.4.00.02.02.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80,186,000.00	75,250,910.00	4,935,090.00	93.84	
4.00.02.4.00.02.02.16.002.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,386,000.00	2,706,910.00	679,090.00	79.94	
4.00.02.4.00.02.02.16.002.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	2,216,000.00	1,536,910.00	679,090.00	69.35	
4.00.02.4.00.02.02.16.002.5.2.2.01.0	Belanja perangko, materai dan benda pos	1,170,000.00	1,170,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.16.002.5.2.2.	Belanja Jasa Kantor	18,000,000.00	18,000,000.00	-	100.0	
4.00.02.4.00.02.02.16.002.5.2.2.03.0	Belanja Jasa Tenaga kerja	18,000,000.00	18,000,000.00	-	100.00	
4.00.02.4.00.02.02.16.002.5.2.2.	Belanja Makanan dan Minuman	58,800,000.00	54,544,000.00	4,256,000.00	92.76	
4.00.02.4.00.02.02.16.002.5.2.2.11.0	Belanja makanan dan minuman rapat	58,800,000.00	54,544,000.00	4,256,000.00	92.76	
4.00.02.4.00.02.02.16.003.	PELAKSANAAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN	295,374,000.00	281,856,200.00	13,517,800.00	95.42	
4.00.02.4.00.02.02.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34,100,000.00	27,900,000.00	6,200,000.00	81.81	
4.00.02.4.00.02.02.16.003.5.2.1.	Uang Lembur	34,100,000.00	27,900,000.00	6,200,000.00	81.81	
4.00.02.4.00.02.02.16.003.5.2.1.03.0	Uang Lembur PNS	34,100,000.00	27,900,000.00	6,200,000.00	81.81	
4.00.02.4.00.02.02.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	261,274,000.00	253,956,200.00	7,317,800.00	97.19	
4.00.02.4.00.02.02.16.003.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	66,455,700.00	61,500,000.00	4,955,700.00	92.54	
4.00.02.4.00.02.02.16.003.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	3,905,700.00	-	3,905,700.00	-	
4.00.02.4.00.02.02.16.003.5.2.2.01.0	Belanja perangko, materai dan benda pos	2,550,000.00	2,100,000.00	450,000.00	82.35	
4.00.02.4.00.02.02.16.003.5.2.2.01.0	Belanja Cenderamata Patung, Pandel & Tropy	60,000,000.00	59,400,000.00	600,000.00	99.00	
4.00.02.4.00.02.02.16.003.5.2.2.	Belanja Jasa Kantor	191,904,000.00	189,816,000.00	2,088,000.00	98.91	
4.00.02.4.00.02.02.16.003.5.2.2.03.0	Belanja Jasa Tenaga kerja	191,904,000.00	189,816,000.00	2,088,000.00	98.91	
4.00.02.4.00.02.02.16.003.5.2.2.	Belanja Operasional Kendaraan	2,914,300.00	2,640,200.00	274,100.00	90.59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.16.003.5.2.2.32.0	Belanja Bahan Bakar Minyak	2,914,300.00	2,640,200.00	274,100.00	90.59	
4.00.02.4.00.02.02.00.00.5.	JUMLAH BELANJA	48,795,096,500.	47,873,932,186.45	921,164,313.55	98.11	
5.9	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(48,795,096,500.	(47,873,932,186.4	(921,164,313.55)	98.11	

Plt. Sekretaris DPRD Kab. Buleleng



I Putu Karuna, SH
NIP. 19660602 199403 1 011

SINGARAJA, 31-Desember-2019

PPK Sekretariat DPRD



Drs. Made Wadika
NIP. 19680708 199403 1 015